

Realizing Lausanne’s Holistic Mission in the Context of Poverty in Indonesia

Friskilia Putri Diah Anggreani ¹⁾* Andreas Hauw ²⁾

¹⁾ Gereja Kristus Yesus Jemaat Sunter, Jakarta, Indonesia

²⁾ Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang, Indonesia

*) Email: friskiliap@gmail.com

Abstract: Poverty is a latent and global social problem in Indonesia. The outbreak of the Covid-19 that hit the world and Indonesia in early 2020 resulted in an economic recession in Indonesia. In this social context, the evangelicals in Indonesia have not taken this problem seriously. Despite that ignorance regarding the issue of poverty, there have been significant changes in the Lausanne Movement, which is reflected in three documents from this movement, Lausanne Covenant, Manila Manifesto, and The Cape Town Commitment. Considering this background, the authors use the point of view of the Lausanne Movement to invite the Indonesian evangelicals to see the context of poverty as an essential factor that must be included in their theological commitment. Furthermore, this article is meant to serve as a theological trigger for the evangelicals in Indonesia to reconsider the significance of their role in the public sphere, particularly in addressing the issue of poverty. Finally, the article’s contribution is three theological points that might be proposals for the Evangelicals in Indonesia to carry out God’s holistic mission for social transformation in the society.

Research Highlights

- Using the three documents from the Lausanne Movement, the authors challenge the evangelicals in Indonesia to see the reality of poverty as an essential element to be included in their theological concerns.
- Based on the three documents of the Lausanne Movement, the authors propose three theological principles to inspire Evangelicals in Indonesia: God’s mission is understood in terms of the wholeness of God’s creation, focused on humanity, and made possible only by the redemptive act of Jesus Christ.

Article history

Submitted 25 April 2021

Revised 20 July 2021

Accepted 21 July 2021

Keywords

poverty in Indonesia; holistic mission; Evangelicalism; Lausanne Covenant; Manila Manifesto; The Cape Town Commitment

© 2021 by authors.

Licensee *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*.

This article is licensed under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International



Scan this QR code with your mobile devices to read online

Mengejawantahkan Misi Holistik menurut Lausanne dalam Konteks Kemiskinan di Indonesia

Friskilia Putri Diah Anggreani¹⁾* Andreas Hauw²⁾

¹⁾ Gereja Kristus Yesus Jemaat Sunter, Jakarta, Indonesia

²⁾ Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang, Indonesia

*³⁾ Korespondensi: friskiliap@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan menjadi masalah sosial laten yang bersifat global bagi bangsa Indonesia. Merebaknya virus Covid-19 yang melanda dunia dan secara khusus Indonesia di awal tahun 2020 membuat angka ekonomi Indonesia mengalami resesi. Di hadapan konteks sosial ini, kaum injili di Indonesia masih kurang memperhatikan isu ini secara serius. Terlepas dari hal ini, terdapat perubahan besar pada gerakan Lausanne (*Lausanne Movement*), yang tercermin pada tiga dokumen dari gerakan ini, *Lausanne Covenant*, *Manila Manifesto*, dan juga *The Cape Town Commitment*. Dengan latar belakang tersebut, penulis menggunakan sudut pandang gerakan Lausanne untuk mengajak kaum injili di Indonesia dapat melihat konteks kemiskinan sebagai faktor penting yang harus dimasukkan dalam komitmen teologis mereka. Di samping itu, tulisan ini diharapkan menjadi pemicu secara teologis bagi kaum injili di Indonesia untuk memikirkan kembali pentingnya keterlibatan mereka di ruang publik, khususnya dalam menjawab masalah kemiskinan. Kontribusi artikel ini adalah tiga pokok teologis yang dapat menjadi usulan bagi kaum injili di Indonesia untuk mengerjakan misi Allah yang holistik demi terwujudnya transformasi sosial masyarakat.

Kata-kata kunci: kemiskinan di Indonesia; misi holistik; gerakan injili; Perjanjian Lausanne; Manifesto Manila; Komitmen Cape Town

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi masalah sosial laten yang bersifat global bagi bangsa ini. Secara khusus, sejak krisis ekonomi tahun 1997–1998, Indonesia terus-menerus terancam oleh problem ekonomi yang dapat memicu krisis multidimensi, seperti krisis sosial, politik,

keamanan, dan sebagainya.¹ Memasuki tahun 2020, Indonesia kembali dikejutkan dengan munculnya wabah virus Covid-19 dan telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 berada di zona negatif sekaligus membawa resesi ekonomi pertama kali sejak tahun 1998.²

¹Lih. Hendro Suwito, "Nightmares continue for Indonesia's Poor," *Global Future: A World Vision Journal of Human Development* (First Quarter 2001): 9–10, https://www.wvi.org/sites/default/files/GF01Q1_web.pdf. Lih. juga Risnawaty Sinulingga, "Ekonomi Kerakyatan Menurut Kitab Amsal," dalam *Ekonomi Kerakyatan*, ed. Muhammad Ridwan (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara/American Institute for Indonesian Studies, 2014), 51–62.

²Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma, "Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 182–189. Berdasarkan skenario terbaik, salah satu proyeksi dalam studi ini adalah tingkat kemiskinan akan meningkat dari 9,2% di September 2019 menjadi 9,7% pada akhir 2020 yang mengakibatkan 1,3 juta orang di Indonesia akan mengalami kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Kontras dengan proyeksi awal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 sebesar 5%, berbagai

Dalam pengumpulan ini, penulis melihat bahwa kaum injili tampak tidak terlalu memberikan perhatian serius terhadap isu-isu sosial di tengah masyarakat, termasuk kemiskinan. Data lama yang penulis temukan mengenai keterlibatan kaum injili dalam isu-isu sosial dilakukan oleh Tim Peneliti ICDS khususnya untuk kota Bandung dan Jakarta, mengungkapkan bahwa walaupun 60% gereja-gereja injili itu setuju bahwa orang Kristen perlu melakukan pelayanan sosial yang holistik, tetapi hanya 20–27% saja yang memberi motivasi untuk terlibat dalam pelayanan holistik, 23–37% gereja yang memberi secara temporer (hanya pada acara-acara tahunan seperti Natal, Paskah, atau program misi gereja), dan hanya 20% gereja yang mengalokasikan dana lebih dari 20% dari total pemasukan gereja untuk pelayanan holistik ini.³

Data terbaru mengenai keterlibatan gereja injili dalam kegiatan sosial didapat dari riset yang dilakukan oleh Bilangan Research Center selama masa pandemi Covid-19. Dalam seminar daring yang diadakan pada bulan Juni 2020 bertajuk “Pelayanan dan Dinamika Gereja Selama Pandemi Covid-19” disampaikan data bahwa dari 561 responden, 72,6% menyatakan gereja telah melakukan kegiatan sosial untuk mereka yang membutuhkan dan masyarakat di luar gereja merasakan berkatnya.⁴ Dibandingkan hasil survei tim peneliti ICDS belasan tahun yang lalu, fakta ini tentu merupakan hal yang menggembirakan karena menunjukkan kepedulian nyata dari gereja-gereja injili kepada masyarakat sekitar yang sedang diterpa kesulitan akibat pandemi Covid-19.

penelitian memperkirakan bahwa Covid-19 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi antara 4,2% hingga –3,5%.

³Tim Peneliti ICDS, “Gereja Dan Kemiskinan: Suatu Survei Tentang Respon Gereja Kalangan Injili Di Kota Jakarta Dan Bandung Terhadap Masalah Kemiskinan,” *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan* 4, no. 1 (2002): 15–17.

⁴Bilangan Research Center, “Pelayanan dan Dinamika Gereja Selama Pandemi Covid-19,” disampaikan dalam Seminar *Online* Hasil Temuan Survei Nasional, Juni 2020.

Namun demikian, semangat keterlibatan dan pelayanan sosial gereja-gereja injili di Indonesia masih bersifat insidental dan belum menjadi sebuah gaya hidup. Hal ini terlihat dari perbandingan data yang disampaikan oleh Bilangan Research Center antara hasil survei Januari–Februari 2021 (dengan jumlah responden 1.137 orang) dengan hasil survei Maret–April 2020. Dari hasil perbandingan itu didapati bahwa 1 dari 2 (50%) orang Kristen di Indonesia tidak mengalami perubahan dalam hal keterlibatan pelayanan sosial atau berbagi pada mereka yang membutuhkan.⁵ Bahkan 22% lebih jarang terlibat dan berbagi.⁶ Informasi ini mengisyaratkan masih lemahnya keterlibatan komunitas orang percaya, khususnya kaum injili, terhadap masalah kemiskinan. Selain itu, pelayanan sosial yang dilakukan gereja-gereja injili masih bersifat seremonial, yang hanya dilakukan pada saat tertentu atau acara tertentu, dengan alasan mempraktekkan ajaran Alkitab.⁷

Dari fakta dan data di atas tampak bahwa kaum injili di Indonesia masih bergumul mengenai bagaimana mengaitkan pekabaran Injil dan juga pelayanan sosial yang mencakup pengentasan kemiskinan. Gereja-gereja injili tampak belum mampu merealisasikan kualitas transformatifnya dengan memberi solusi terbaik terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kaum injili di Indonesia perlu membangun kembali komitmen teologis yang mengintegrasikan pekabaran Injil dan pelayanan sosial dalam upaya menjalankan misi yang bersifat holistik.

⁵Bilangan Research Center, “Spiritualitas Umat Kristen Indonesia 2021,” disampaikan dalam Seminar *Online* Pendalaman Hasil Survei Nasional Spiritualitas 2021, Juni 2021. Lihat juga hasil temuan ini yang disampaikan dalam bentuk gambar di akun resmi *Instagram* Bilangan Research Center, <https://www.instagram.com/p/CPGBAhhhiSA>.

⁶Ibid.

⁷Tim Peneliti ICDS, “Gereja dan Kemiskinan,” 17.

METODE PENELITIAN

Lewat tulisan ini, penulis mencoba menjawab problem di atas melalui pembahasan ketiga dokumen Lausanne, *The Lausanne Covenant* (LC), *The Manila Manifesto* (MM), dan *The Cape Town Commitment* (TCTC) dan mengkontekstualisasikannya di dalam situasi sosial di Indonesia, secara khusus di dalam konteks kemiskinan.⁸ Ketiga dokumen Lausanne ini merupakan dokumen penting bagi kaum injili karena berisi konsensus dari orang-orang injili di seluruh dunia mengenai visi dan misi seorang injili di dunia ini, termasuk juga keterlibatannya pada isu-isu sosial seperti kemiskinan. Secara teologis, gerakan Lausanne merefleksikan keyakinan iman dan misi injili dalam bentuk yang paling utuh, baik mengenai penginjilan maupun tanggung jawab sosial. Mark A. Noll menyatakan bahwa kongres ini, “*it did represent and stimulate important changes among the world’s conservative or evangelical Protestants.*”⁹ Sebagai dampaknya, seorang injili dapat menjadi saksi di Indonesia. Oleh karena itu, ketiga dokumen ini dapat dipakai sebagai lensa untuk mengevaluasi dan memotivasi kaum injili di Indonesia agar dapat terlibat aktif dalam isu-isu sosial, seperti kemiskinan.

⁸Dalam artikel ini, penulis akan menggunakan LC sebagai singkatan dari *Lausanne Covenant*, MM sebagai kependekan dari *Manila Manifesto*, dan TCTC sebagai singkatan dari *The Cape Town Commitment*.

⁹Mark A. Noll, ed., *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*, ed. ke-3 (Grand Rapids: Baker, 2012), 297. Dokumen-dokumen dari gerakan Lausanne ini tidak terformulasi secara tiba-tiba atau pada suatu waktu tertentu, melainkan secara dinamis dan progresif. Artinya, gerakan ini telah melewati proses perkembangan yang konsep lengkapnya terbentuk melalui proses pemikiran dari berbagai konsultasi injili yang diselenggarakan sesudah momentum Lausanne. Tentu gerakan Lausanne ini terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun untuk bertindak secara kontinu sesuai panggilan misioner Allah baginya. Di tahun 2021, gerakan Lausanne telah mengadakan sebuah webinar mengenai “*The Church in A Post-Covid World*” yang diikuti oleh orang-orang injili di seluruh dunia sebagai bentuk progresivitas gerakan Lausanne untuk mencoba berdiskusi dan memaparkan kondisi gereja pada masa pandemi dan langkah apa yang harus dilakukan gereja bagi dunia.

Untuk mencapai tujuan ini, penulis akan membagi tulisan ini ke dalam tiga bagian besar. Pada bagian pertama, penulis akan memaparkan konteks kemiskinan di Indonesia. Pada bagian kedua, penulis akan membahas mengenai tiga dokumen Lausanne dan juga implikasinya bagi konteks berteologi di Indonesia. Pada bagian terakhir, penulis akan menyimpulkan tulisan ini dengan memberikan beberapa implikasi dari gerakan Lausanne bagi misi holistik kaum injili di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Kemiskinan di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang. Jumlah ini meningkat 1,13 juta orang dibandingkan pada Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang dibandingkan pada September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% dibandingkan pada Maret 2020, dan meningkat 0,97% dibandingkan pada September 2019.¹⁰ Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II 2020 sebesar -5,32%.¹¹ Karena hal ini Indonesia mengalami resesi

¹⁰“Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen,” *Badan Pusat Statistik*, diakses 9 Maret 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. Tentu setiap data yang digunakan dapat mengalami perubahan yang masif. Data kemiskinan ini diambil dari situs resmi BPS yang merilis data setiap beberapa bulan sekali. Meskipun dalam artikel ini data kemiskinan mengacu pada data bulan September 2020, namun pemaparan dari artikel ini dapat terus diaplikasikan (terkhusus di masa pandemi Covid-19) mengingat isu kemiskinan ini masih terus menjadi pergumulan bersama bagi bangsa ini.

¹¹Dewi Wuryandani, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya,” *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis XII*, no. 15 (Agustus 2020): 19–20, diakses 9 Maret 2021, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20singkat-XII-15-I-P3DI-Agustus-2020-206.pdf.

ekonomi. Jadi, Meskipun data pemerintah, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin hanya sekitar 10% dari total populasi Indonesia, masalah ini tidak bisa dianggap sepele.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan) yang diukur dari sisi pengeluaran.¹² Dari hal ini dapat dilihat bahwa potret kemiskinan di negeri ini dengan jelas dapat dilihat dari data statistik yang ada. Walaupun perlu diakui bahwa statistik tersebut hanya menjelaskan sebagian dari realitas sosial yang ada, namun hal itu telah menunjukkan bahwa masalah kemiskinan adalah hal yang sangat serius di Indonesia.¹³ Namun, terdapat pula problem dari nilai garis kemiskinan di Indonesia.

Secara sekilas, pengamatan terhadap jumlah orang-orang miskin dari data BPS sepertinya tidak tampak ada masalah yang serius mengenai kemiskinan. Namun, persoalan ini telah terendus oleh Bank Dunia bahkan sejak sebelum wabah Covid-19 merebak. Menurut Bank Dunia, data statistik mengenai kemiskinan di Indonesia dianggap tidak memiliki persyaratan yang ketat terkait definisi kemiskinan itu sendiri. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya sebesar Rp458.947,00 yang sebenarnya masih tergolong memiliki standar hidup yang sangat rendah baik dalam pengertian Bank Dunia

maupun dalam pengertian orang Indonesia sendiri.¹⁴

Seorang tokoh Kristen, A.A. Yewangoe memberikan masukan pada tahun 1990 mengenai perhitungan garis kemiskinan yang tidak menunjukkan masalah kemiskinan yang sebenarnya.¹⁵ Kritik yang lebih tajam dinyatakan oleh Carunia Mulya Firdausy, seorang guru besar ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan juga peneliti senior LIPI.¹⁶ Ia mengemukakan mengenai perhitungan garis kemiskinan yang perlu direvisi. Pertama, perhitungan garis kemiskinan masih terlalu terfokus pada faktor pangan dan beberapa faktor nonpangan. Akibatnya, terdapat kasus orang miskin yang tidak masuk kategori miskin. Misalnya, jika seorang pekerja yang hanya berpenghasilan Rp500.000,00 per bulan masih dikategorikan tidak miskin meskipun tidak mampu menyekolahkan anaknya atau mendapatkan akses kesehatan. Melalui contoh ini, terdapat masalah dari perhitungan nilai garis kemiskinan itu sendiri.

Kedua, pemilihan faktor nonpangan masih sewenang-wenang dalam menghitung garis kemiskinan sehingga mengakibatkan nilai garis kemiskinan masih belum mencerminkan keadaan kemiskinan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pada artikel selanjutnya, Firdausy melanjutkan usulannya agar pemerintah dapat menaikkan garis kemiskinan, karena sebenarnya jumlah penduduk miskin lebih banyak dari data statistik BPS.¹⁷

¹²Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial,” <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

¹³Tim Peneliti ICDS, “Gereja dan Kemiskinan,” 5. Lih. juga “Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,” *The World Bank*, 22 Oktober 2014, <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>.

¹⁴Badan Pusat Statistik, “Perhitungan Garis Kemiskinan,” <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

¹⁵A.A. Yewangoe, “Keprihatinan dan Harapan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan di Indonesia,” dalam *Gerakan Oikoumene: Tegar Mekar Di Bumi Pancasila*, ed.

J.M. Pattiasina dan Weinata Sairin, edisi ke-4 (Jakarta: Gunung Mulia, 2012), 73. Lih. juga Adrianus Yosia, “Apakah yang Cape Town Perlu Katakan pada [Kaum Injili di] Indonesia?: Suatu Tinjauan dan Refleksi terhadap Komitmen Cape Town dan Implikasinya pada Kaum Injili di Indonesia,” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 16, no. 2 (2017): 119. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.13>.

¹⁶Carunia Mulya Firdausy, “Revisi Atas Garis Kemiskinan,” *Harian Kompas*, 21 April 2014, <https://cpps.ugm.ac.id/revisi-atas-garis-kemiskinan>.

¹⁷Carunia Mulya Firdausy, “Garis Kemiskinan Perlu Dinaikkan,” *Kompas*, 17 Oktober 2014, <https://www.brin.go.id/garis-kemiskinan-perlu-dinaikkan>.

Problem lainnya adalah konsep kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah adanya perbedaan yang besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam kaitan lokasi geografis.¹⁸ Pengertian kemiskinan absolut sendiri sering dikenal sebagai subsistensi yang biasanya digambarkan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Beberapa sosiolog juga menambahkan kebutuhan akan pendidikan, keamanan, kesenangan dan rekreasi sebagai kebutuhan dasar kultural yang ditambahkan ke dalam definisi ini. Kemiskinan relatif didefinisikan oleh Peter Townsend sebagai seseorang atau sekelompok orang yang dapat dikatakan dalam kondisi miskin karena ia tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh makanan dan fasilitas kebutuhan lainnya yang layak seperti standar normal masyarakat.¹⁹ Jika kemiskinan dilihat dalam pengertian absolut tercatat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan berada di pulau Jawa (yang terletak di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dan jika kemiskinan dilihat dalam pengertian relatif, maka daerah-daerah di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, fakta bahwa kemiskinan merupakan salah satu krisis kemanusiaan nyatanya terjadi bukan hanya karena kondisi masyarakat yang kurang giat berusaha untuk menyejahterakan diri, tetapi juga terjadi akibat struktur yang menindas atau bisa juga miskin akibat dimiskinkan, yang dikenal sebagai kemiskinan struktural.²⁰ Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan Indonesia mengalami resesi ekonomi.

Dengan melihat fakta dan data mengenai realitas kemiskinan yang terjadi di Indonesia, bagaimanakah kaum injili di Indonesia dapat berkontribusi dalam menjawab permasalahan tersebut melalui pelayanan misi yang holistik dan transformatif?

Misi Holistik: Suatu Definisi

Christopher Wright mendefinisikan misi holistik sebagai “*demonstrates our God’s desires to be known and praised by all peoples in all of the earth.*”²¹ Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengerjakan misi yang bersifat utuh dan mewartakan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Melihat definisi ini dan berdasarkan konteks kemiskinan di atas, penulis melihat bahwa ada dua syarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di bangsa ini.

Pertama, kaum injili harus berada di tengah-tengah masyarakat, artinya ia tidak memisahkan atau mengisolasi diri dari lingkungan sekitar. John Stott menyatakan bahwa seharusnya umat Tuhan tidak dapat hidup tenang ketika melihat dunia sekitarnya berada dalam kesulitan.²²

Kedua, melibatkan diri secara aktif di dalam masalah-masalah sosial yang ada. Misalnya, dengan cara bergabung kepada suatu kelompok yang berkomitmen untuk mempelajari dan bertindak dalam isu-isu di bidang perdamaian (*peace*), keadilan (*justice*), lingkungan hidup (*environment*), kelaparan (*hunger*), ketiadaan tempat tinggal (*homeless*), ketidakseimbangan ekonomi Utara-Selatan (*North-South economic inequality*), martabat hidup manusia (*human life sanctity*), keselarasan

¹⁸Nunung Nurwati, “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan,” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10, no. 1 (2008): 3, <https://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>.

¹⁹Ibid.

²⁰Arkhipus Djurubasa and Ricardo Freedom Nanuru, “Pemetaan dan Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan pada Jemaat-Jemaat Gereja Masehi Injili di

Halmahera (GMIH) di Kabupaten Pulau Morotai,” *Laporan Penelitian LPPM Universitas Halmahera – Tobelo* (2015): 3, <http://doi.org/10.31227/osf.io/j96yb>.

²¹Lih. definisi Misi Holistik dalam buku Christopher Wright, *The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative* (Downers Grove: InterVarsity, 2006).

²²John R.W. Stott, *Christian Basics* (Grand Rapids: Baker, 1991), 151.

rasial (*racial harmony*), atau hak-hak asasi manusia (*human rights*).²³

Lebih lanjut, Stott menyatakan bahwa orang percaya seharusnya dipahami sebagai, pertama, gereja yang memberi dampak (*an influencing church*). Ia menggambarkan kehadiran orang percaya seharusnya membawa pengaruh seperti garam dan terang dunia yang mana dapat dirasakan oleh semua orang (Mat. 5:13–16).²⁴ Ia menjelaskan bahwa “*a Christian’s character as described in the beatitudes and a Christian influence as defined in the salt and light metaphors are organically related one to another. Our influence depends on our character.*”²⁵ Dengan demikian, orang percaya memiliki panggilan dan karakteristik yang fundamental di tengah dunia ini. Tanggung jawab ini secara konkret dinyatakan dengan cara mempengaruhi dunia melalui peran ganda dari orang-orang percaya, yaitu dengan bertanggungjawab untuk memikirkan dan mencari solusi bagi masalah-masalah sosial dan bertanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada dunia sebagaimana yang dimandatkan oleh Amanat Agung Kristus.

Kedua, orang percaya dipahami sebagai gereja yang menunjukkan kasih (*a loving church*, lih. Kis. 2:41–47). Stott menjelaskan mengenai ekspresi yang paling jelas dari cara hidup orang percaya adalah dengan *radical attitude*, *social action*, dan *equitable principle* yang dilakukan oleh orang percaya.²⁶ Istilah *radical attitude* artinya jemaat tidak lagi menganggap milik mereka sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan menjadi kepunyaan bersama; *social action* adalah bagaimana mereka membagikan apa yang mereka punyai kepada orang lain sehingga tidak ada seorang

pun yang berkekurangan; dan *equitable principle* berarti pembagian yang dilakukan merata sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, orang percaya dilihat sebagai gereja yang peduli (*a caring church*). Stott mengungkapkan bahwa orang percaya seharusnya mampu memperhatikan sesama manusia dalam dua arah, baik ke dalam, kepada sesama orang percaya, maupun keluar, kepada orang-orang yang belum percaya (Rm. 12:9–16; 13:8–10).²⁷

Keempat, orang percaya merupakan gereja yang menjangkau dunia (*a world-engaging church*, lih. Tit. 3:1–2). Stott mengungkapkan bahwa orang-orang percaya dipanggil untuk terlibat aktif dalam mendatangkan kesejahteraan sosial kepada semua orang.²⁸

Kaitan Dokumen Lausanne dan Misi Ilahi

Panggilan yang sama seperti di atas telah disuarakan oleh ketiga dokumen penting dalam gerakan Lausanne. Dua dokumen pertama berisikan konsensus dari orang-orang injili di seluruh dunia mengenai visi dan misi seorang injili di dunia, sedangkan dokumen ketiga dari gerakan Lausanne berisikan mengenai keterlibatan kaum injili dalam tanggung jawab sosial. Ikrar Lausanne telah terlebih dahulu menggeser paradigma misi yang bersifat parsial, sempit, dan kurang berdampak transformatif menjadi lebih utuh, luas, dan mengubah.

Gerakan Lausanne telah membawa pengertian misi bergerak dalam sebuah lintasan (penelusuran sejarah) yang berusaha mencapai titik keseimbangan di dalam idealisme

²³Ibid, 152-153. Istilah “*Global North*” dan “*Global South*” sendiri merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh Bank Dunia dan organisasi lainnya untuk mengidentifikasi negara-negara mengenai kesenjangan ekonomi Utara-Selatan, sehingga istilah ini sedang tidak merujuk kepada letak geografis.

²⁴John R.W. Stott, *Christian Counter-Culture: The Message Of The Sermon On The Mount* (Downers Grove: InterVarsity, 1978), 63.

²⁵Ibid., 63–66, 68.

²⁶John R.W. Stott, *The Spirit, the Church, and the World: The Message of Acts* (Downers Grove: InterVarsity, 1990), 106–108.

²⁷John R.W. Stott, *Romans: God’s Good News for the World* (Downers Grove: InterVarsity, 1994), 348–350.

²⁸John R.W. Stott, *Guard the Truth: The Message of 1 Timothy and Titus* (Downers Grove: InterVarsity, 1997), 198–199.

misi Allah (*missio Dei*) itu sendiri. Rose Dowsett menegaskan bahwa orientasi misi sesudah Lausanne adalah misi yang terpadu (*integral mission*), yang mengintegrasikan antara penginjilan, pelayanan, dan tindakan sosial secara bersamaan.²⁹ Melalui konferensi-konferensi tersebut, gerakan Lausanne telah meletakkan fondasi yang kuat dan progresif yang menyatakan bahwa misi Allah idealnya adalah bersifat holistik atau utuh.³⁰ Robert Schreiter menyatakan bahwa gerakan ini telah bergerak dari *covenant* (Lausanne), menuju *manifesto* (Manila), dan berakhir pada *commitment* (Cape Town).³¹ Ia bergerak secara progresif dari pemahaman, pengakuan iman, motivasi, dan akhirnya pada komitmen untuk bertindak sesuai dengan panggilan misioner Allah baginya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Valdir Steuernagel, bahwa gerakan Lausanne merupakan model misi injili yang merangkul keterlibatan sosiopolitik (*sociopolitical engagement*) yang sekaligus merevitalisasi *missio Dei* kaum injili.³²

Berangkat dari ketiga dokumen di atas, penulis melihat bahwa paradigma misi yang dihasilkan oleh gerakan Lausanne adalah penting dan relevan jika diletakkan dalam konteks misi kaum injili di Indonesia. Bersama dengan kaum injili dunia, kaum injili Indonesia juga memiliki panggilan yang sama seperti yang diamanatkan oleh gerakan Lausanne ini. Gerakan Lausanne menolong kaum injili di Indonesia untuk kembali menekankan kesatuan dalam menjalankan misinya yang ber-

sifat utuh, luas, dan transformatif. Paradigma misi holistik setelah gerakan Lausanne dapat menyediakan pijakan bersama bagi kaum injili di Indonesia untuk melaksanakan *missio Dei* secara kolektif dan konsisten, khususnya sehubungan dengan keterlibatan dalam isu kemiskinan di Indonesia. Semua relevansi ini memberi harapan sekaligus tantangan bagi masa depan misi injili di Indonesia. Oleh karena itu, tesis penulis adalah pemikiran teologis dari ketiga dokumen Lausanne dapat menjadi suatu tuntunan bagi kaum injili untuk berkarya di dalam masyarakat Indonesia yang plural dan menjadi saksi Kristus dalam menjawab masalah kemiskinan di Indonesia.

Sejarah Singkat Gerakan Lausanne

Gerakan Lausanne memiliki tiga buah konferensi yang sangat besar yang dinamakan *Lausanne Congress of World Evangelization* (LCWE). Kongres-kongres ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah kaum injili di mana telah menghasilkan dokumen-dokumen penting sebagai kerangka konseptual bagi kaum injili untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia.³³ Pada LCWE I, dokumen yang dihasilkan adalah Perjanjian Lausanne (*Lausanne Covenant*), sedangkan pada LCWE II dokumen yang dihasilkan adalah Manifesto Manila (*The Manila Manifesto*). Sebagai kelanjutan dari LCWE I dan LCWE II, diadakanlah LCWE III yang menghasilkan dokumen Komitmen Cape Town (*The Cape Town Commitment*).³⁴

²⁹Rose Dowsett, "Evangelism, Service and Social Action in the Missional Understanding of the Cape Town Commitment," *Norwegian Journal of Missiology* 71, no. 4 (2017): 45–53, <https://doi.org/10.48626/ntm.v71i4.4401>.

³⁰Sebagaimana ditegaskan oleh Mark Russell, "Christian Mission Is Holistic," *International Journal of Frontier Missiology* 25, no. 2 (2008): 93–98.

³¹Robert J. Schreiter, "From Lausanne Covenant to the Cape Town Commitment: A Theological Assessment," *International Bulletin of Missionary Research* 35, no. 2 (April 2011): 88–93, <https://doi.org/10.1177/239693931103500205>.

³²Valdir R. Steuernagel, "Social Concern and Evangelization: The Journey of the Lausanne Movement," *International Bulletin of Missionary Research* 15, no. 2 (April 1991): 53. <https://doi.org/10.1177/239693939101500202>.

³³Arthur Johnston, ed., *The Battle for World Evangelism* (Wheaton: Tyndale, 1978), 291.

³⁴Ketiga dokumen pertama diakses secara digital. Perjanjian Lausanne dapat diakses di "The Lausanne Covenant," *Lausanne Movement*, <https://lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant>. Manifesto Manila dapat diakses di "The Manila Manifesto," *Lausanne Movement*, <https://lausanne.org/content/manifesto/the-manila-manifesto>. Sedangkan Komitmen Cape Town dapat diakses di "The Cape Town Commitment," *Lausanne Movement*, <https://lausanne.org/content/ctc/ctcommitment>. Mark A. Noll menyatakan bahwa dokumen Perjanjian Lausanne (termasuk kedua dokumen lainnya) sebagai salah satu hal yang penting bagi kaum injili. Lih. Noll, *Turning Points*, 297–305.

Kongres Lausanne I (1974): Perjanjian Lausanne

Billy Graham berkata, “*We are gathered in Lausanne to let the earth hear His voice.*”³⁵ Kalimat ini merupakan kalimat kunci yang membuat Billy Graham melakukan pertemuan di Lausanne, Swiss pada tahun 1974 untuk membahas mengenai strategi penginjilan holistik kepada dunia. Kongres pertama ini berlangsung selama sepuluh hari dengan pokok pembahasan utamanya adalah masalah proklamasi Injil.³⁶ Mengutip pidato Billy Graham, John Stott mencatat tujuan dari kongres ini adalah bahwa, diperlukannya rumusan suatu deklarasi yang alkitabiah, yang menantang gereja “untuk menyelesaikan tugas penginjilan dunia,” dan memberikan pernyataan yang jelas mengenai penginjilan dan tanggung jawab sosial, serta mengembangkan dan mengajak kaum injili di seluruh dunia untuk mengerjakan panggilan ini.³⁷ Upaya Lausanne I ini adalah untuk meluruskan kembali pemahaman teologi dari penginjilan.

Lausanne I berisi lima belas afirmasi yang di antaranya berbicara mengenai penginjilan, tanggung jawab sosial, hingga kesatuan daya dalam memberitakan Injil, yang disebut dengan Ikrar Lausanne.³⁸ Robert Schreiter melihat bahwa penggunaan kata “ikrar” melambatkan kesatuan, karena kata tersebut memiliki pemahaman yang dalam, baik secara biblikal maupun menurut tradisi Reformed.³⁹ Pertemuan ini menghasilkan dokumen penting bagi kaum injili yang dinamakan Perjanjian Lausanne (*Lausanne Covenant*, LC), yang menurut Scherer dan Bevans disebut sebagai “*the high point of the development of evangelical theology of mission.*”⁴⁰

Sekalipun Lausanne I telah memberikan pemahaman baru mengenai penginjilan, namun tanggung jawab sosial masih diartikan sebagai kesaksian melalui cara hidup yang sesuai dengan panggilan kristiani. Pada LC 4, dituliskan mengenai penyebaran kabar baik mengenai Yesus Kristus yang mati untuk dosa manusia dan yang telah bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan kuasa-Nya serta menawarkan pengampunan dosa kepada semua orang yang bertobat dan percaya.⁴¹ Kesaksian melalui gaya hidup kristiani disebutkan pada LC 6, demikian:

*We affirm that Christ sends his redeemed people into the world as the Father sent him, and that this calls for a similar deep and costly penetration of the world. We need to break out of our ecclesiastical ghettos and permeate non-Christian society.*⁴²

Sebagai dampaknya, kaum injili perlu masuk ke dalam ruang publik dan memberikan kesaksian tentang proklamasi Injil di sana. Menariknya, Graham menegaskan pada LC 5 bahwa seorang Kristen seharusnya menyatakan kepedulian Allah akan keadilan dan rekonsiliasi melalui komunitas manusia dan bagaimana Allah telah membebaskan semua laki-laki dan perempuan dari segala macam bentuk penindasan. Hal ini didasarkan oleh keyakinan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, terlepas dari ras, agama, warna kulit, budaya, kelas, jenis kelamin ataupun usia, diciptakan dalam rupa Allah, sehingga perlu dihormati dan dilayani, bukan dieksploitasi. Walaupun rekonsiliasi ini berbeda dengan rekonsiliasi dengan Tuhan, namun seorang Kristen mengafirmasi bahwa penginjilan dan keterlibatan sosial-politik dalam

³⁵Billy Graham, “Let The Faith Hear His Voice,” in *Let the Earth Hear His Voice: A Comprehensive Reference Volume on World Evangelization*, ed. J.D. Douglas (Minneapolis: World Wide, 1975), 16–17.

³⁶Noll, *Turning Points*, 297–298.

³⁷John R.W. Stott, *Making Christ Known: Historic Mission Documents from the Lausanne Movement, 1974–1999* (Grand Rapids: Eerdmans, 1997), xiv.

³⁸Lih. “The Lausanne Covenant.”

³⁹Schreiter, “From Lausanne Covenant,” 88.

⁴⁰James A. Scherer and Stephen B. Bevans, *New Directions in Mission and Evangelization: Basic Statements 1974–1991*, vol. 1 (New York: Orbis, 1992), xviii.

⁴¹“The Lausanne Covenant.” Lih. juga Stott, *Making Christ Known*, 1–56.

⁴²“The Lausanne Covenant.”

sebuah komunitas adalah bagian dari panggilan seorang Kristen.

Melalui pernyataan ini, tanggung jawab sosial yang biasanya diidentikkan dengan kelompok ekumenis menjadi sesuatu yang kini penting bagi kaum injili. Karena itu, penginjilan dan tanggung jawab sosial dapat berjalan berdampingan. Meskipun tanggung jawab sosial sudah mulai masuk ke dalam pembahasan kongres ini, Schreiter menyimpulkan bahwa dalam Lausanne I lebih menekankan mengenai pertobatan dan keselamatan individu.⁴³

Kongres Lausanne II (1989): Manifesto Manila

Lima belas tahun pasca LCWE I, diadakan kembali kongres LCWE yang kedua pada tanggal 11–20 Juli 1989 di Manila, Filipina dan dihadiri oleh lebih dari 3000 orang injili dari 170 negara di dunia.⁴⁴ Pertemuan yang kedua ini menghasilkan dokumen yang penting bagi kaum injili yang dinamakan Manifesto Manila (*The Manila Manifesto*, MM) yang berisikan 21 afirmasi dan beberapa artikel yang dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu “*The whole gospel, the whole church, and the whole world.*”⁴⁵ Menurut Erhard Berneburg, istilah “*whole*” yang digunakan mengacu pada konsep yang utuh dan luas dari “*both the gospel and the world.*”⁴⁶ Dengan demikian, hubungan ketiganya menjadi tema dari kongres kedua ini, yaitu “*The whole church taking the whole gospel to the whole world.*”⁴⁷

Lausanne II ini memiliki kerinduan untuk memberikan respons terhadap perkembangan penginjilan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial. Hal ini sangatlah kentara di

dalam afirmasi-afirmasi yang ada pada dokumen MM ini. Afirmasi pertama menyatakan bahwa, “*We affirm our continuing commitment to the Lausanne Covenant as the basis of our cooperation in the Lausanne movement.*”⁴⁸ Penekanan mengenai penginjilan dunia rupanya masih menjadi poin yang sangat penting dalam LCWE kedua ini.

Menariknya, beberapa poin menyatakan berbagai penyesalan yang dikemukakan oleh kaum injili. Misalnya, MM 4 menyatakan bahwa proklamasi kerajaan Allah memerlukan suatu pengumuman profetis dengan berbagai hal yang bertentangan dengan itu. Di antara kejahatan-kejahatan yang ada, kejahatan yang disesalkan adalah kekerasan yang tersistematisasi, korupsi politik, segala bentuk eksploitasi manusia dan bumi secara tidak tepat, kerusakan keluarga, sampai kepada kemiskinan.⁴⁹

Dari MM 4 tampak bahwa pertemuan kedua ini mulai memperhatikan unsur dari tanggung jawab sosial sebagai bagian dari misi yang holistik. Sebagai dampaknya, proklamasi Injil juga memperhatikan aspek “*recognition that the biblical gospel has inescapable social implications.*”⁵⁰ Samuel Escobar ingin menegaskan kembali bahwa perhatian dan keprihatinan misi gereja seharusnya juga ditujukan kepada hal “*justice for the poor and oppressed.*”⁵¹ Tom Houston menyuarakan bahwa misi holistik harus dijalankan di seluruh dunia. Ia berpendapat bahwa mayoritas negara-negara yang belum menerima Injil merupakan negara-negara yang miskin secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara-negara di Barat.⁵² Oleh karena itu, Houston mengajak kaum injili untuk ikut berbagian dalam melakukan

⁴³Schreiter, “From Lausanne Covenant,” 88.

⁴⁴“The Manila Manifesto.” Untuk lebih lengkap lihat juga Stott, *Making Christ Known*, 230.

⁴⁵“The Manila Manifesto.”

⁴⁶Erhard Berneburg, “Conference Theology: Mission Theology after San Antonio and Manila,” *Themelios (An International Journal for Theological and Religious Studies Students)* 16, no. 2 (Februari 1991): 11–13.

⁴⁷“The Manila Manifesto.”

⁴⁸Ibid.

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Ibid.

⁵¹Samuel Escobar, “A Movement Divided: Three Approaches to World Evangelization Stand in Tension With One Another,” *Transformation* 8, no. 4 (Oktober 1991): 12–13. <https://doi.org/10.1177/026537889100800409>.

⁵²Robert T. Coote, “Lausanne II and World Evangelization,” *International Bulletin of Missionary Research* 14, no. 1 (Januari 1990): 12–13. <https://doi.org/10.1177/239693939001400103>.

tanggung jawab sosial di negara-negara yang belum menerima Injil.

Manifesto Manila telah memberikan kelanjutan pembahasan serta kepastian teologi mengenai misi holistik, khususnya dalam hal tanggung jawab sosial. Sebagai dampak dari hal ini, tentunya proklamasi Injil dan tanggung jawab sosial tidak lagi dipertentangkan, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan dari misi kerajaan Allah. LCWE II ingin menegaskan kembali “*Let the Earth Hear His Voice!*” Didukung oleh para teolog seperti Billy Graham, Stott dalam pidatonya mengungkapkan bahwa Injil tidak dapat diberitakan di ruang hampa karena penginjilan membutuhkan kehadiran, proklamasi, persuasi, dan dialog.⁵³ Terdapat dua tema besar yang dinyatakan, yaitu “*Proclaim Christ until He Comes*” dan “*Calling the Whole Church to take the Whole Gospel to the Whole World.*”⁵⁴ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bahwa konsekuensi dari penginjilan adalah perubahan hati nurani untuk ikut terlibat dalam mengerjakan tanggung jawab sosial di dunia.

Kongres Lausanne III (2010): Komitmen Cape Town

Lausanne III merupakan babak baru setelah berakhirnya Lausanne II dengan tidak lagi memperdebatkan mengenai misi holistik melainkan menjadi sebuah praksis. Tujuan utama dalam Lausanne III terdiri dari beberapa topik. Secara keseluruhan, tujuan dari pertemuan ini adalah “*to bring a fresh chal-*

lenge to the global Church to bear witness to Jesus Christ and all his teaching—in every nation, in every sphere of society, and in the realm of ideas.”⁵⁵ Rene Padilla mengatakan bahwa sebagian besar fokus dari Lausanne III adalah untuk membahas mengenai pemuridan yang radikal, globalisasi, dan kemiskinan.⁵⁶ Oleh karena itu, penekanan yang diberikan dalam Lausanne III ini adalah dari sudut pandang biblika.

Pada bagian pembukaan dari dokumen kongres ketiga ini dituliskan di sana bahwa kongres ini akan menjadi semacam panduan dari gerakan Lausanne selama beberapa tahun ke depan.⁵⁷ Berbicara mengenai Komitmen Cape Town (TCTC), dokumen ini dibagi ke dalam dua bagian besar. Bagian pertama berhubungan dengan pengakuan iman (*The Cape Town Confession of Faith*) dan bagian kedua berhubungan dengan apa yang harus dilakukan (*The Call for Action*).⁵⁸ Rose Dowsett menegaskan bahwa Allah telah secara konkret bertindak di dalam dunia dan tindakan Allah ini dikemas dalam dua bentuk utama, yaitu kasih dan rekonsiliasi.⁵⁹ Penekanan yang diberikan dalam bingkai besar dari Komitmen Cape Town adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kasih Allah bagi dunia akan nyata melalui tindakan kasih yang dinyatakan oleh umat-Nya ketika mengerjakan misi-Nya kepada dunia.

Melalui pemahaman ini, kaum injili akan lebih siap dan mampu untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul, yang menurut

⁵³Stott, *Making Christ Known*, 20. Athol Gill mencatat bahwa ada beberapa teolog yang melaksanakan tanggung jawab sosial dari Amerika, seperti Carl F. Henry, John Stott, dan George Hoffman, sedangkan teolog dari dunia ketiga adalah Rene Padilla dan Samuel Escobar. Mereka masing-masing mengungkapkan yang intinya sama yaitu bahwa penginjilan dan tanggungjawab sosial tidak dapat dipisahkan. Lih. Athol Gill, “Christian Social Responsibility,” dalam *The New Face of Evangelicalism: An International Symposium on the Lausanne Covenant*, ed. Rene C. Padilla (Downers Grove: InterVarsity, 1976), 90–91.

⁵⁴Alan Nichols, *The Whole Gospel for the Whole World: Story of Lausanne II Congress on World Evangelization, Manila, 1989* (Charlotte: Lausanne Committee for World Evangelization, 1989), 110.

⁵⁵Christopher J.H. Wright dan Jonathan J. Bonk, ed., “The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and A Call to Action,” *International Bulletin of Missionary Research* 35, no. 2 (April 2011): 59. <https://doi.org/10.1177/239693931103500202>.

⁵⁶Rene C. Padilla, “From Lausanne I to Lausanne III,” *Journal of Latin American Theology* 5, no. 2 (2010): 44.

⁵⁷Wright dan Bonk, ed., “The Cape Town Commitment,” 59.

⁵⁸Ibid., 59–80.

⁵⁹Rose Dowsett, *The Cape Town Commitment: Study Edition* (Peabody: Hendrickson, 2012). Bdk. J.E.M. Cameron, ed., *Christ Our Reconciler: Gospel, Church, World* (Downers Grove: InterVarsity, 2012).

Gideon van der Watt, berdimensi luas dan beragam seperti pluralisme dan globalisasi, peperangan dan kemiskinan, perbudakan dan perdagangan manusia, kebangkitan religius, industrialisasi, krisis ekologi, dan sebagainya.⁶⁰ Lausanne III telah siap secara kualitas untuk menjadi pedoman dalam praksis misi holistik, khususnya bagi kaum injili.⁶¹ Sebagaimana yang dikatakan Steuernagel, Komitmen Cape Town telah menjadi model misi holistik yang merangkul aspek keterlibatan sosial-politik sekaligus merevitalisasi *missio Dei* kaum injili.⁶²

Dapat terlihat bahwa meskipun Lausanne II tidak mencapai titik sepakat yang utuh di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, tidak demikian dengan Lausanne III. Dalam Komitmen Cape Town tertulis jelas mengenai tanggung jawab sosial, baik sebagai pernyataan iman maupun sebagai panggilan untuk beraksi.⁶³ Pernyataan iman ketujuh Komitmen Cape Town menyatakan kesediaan untuk mengasihi sesama terlebih lagi kepada mereka yang mengalami marginalisasi sehingga pernyataan iman kesepuluh menyatakan bahwa misi holistik memerlukan proklamasi dan demonstrasi.⁶⁴ Padilla menyatakan bahwa Lausanne III, di satu sisi, telah berhasil mempersatukan secara signifikan mengenai penginjilan dan tanggung jawab sosial, walaupun ia sendiri menilai bahwa Lausanne III, di sisi lain, telah memisahkan penginjilan dan tanggung jawab sosial ke dalam posisi yang berbeda.⁶⁵

Komitmen Cape Town menantang kaum injili untuk bertindak atas dasar perjanjian Lau-

sanne dan Manifesto Manila yang sudah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Kongres ketiga ini mengajar mereka untuk memikirkan tindakan konkret dari arti pengakuan iman yang telah disusun bersama dalam kedua momen penting sebelumnya.⁶⁶ Melalui kongres ini, paradigma misi holistik menjadi lebih utuh, luas, dan transformatif.

Implikasi Gerakan Lausanne bagi Pelayanan Kaum Injili Indonesia

Berangkat dari berbagai isu kemiskinan yang sudah mengakar, gerakan Lausanne mengajak kaum injili untuk memenuhi panggilan misionalnya, yaitu berpartisipasi dalam penebusan dan transformasi dunia. Dalam konteks Indonesia, secara pribadi penulis melihat bahwa selama ini keterlibatan kaum injili dalam tanggung jawab sosial dianggap belum banyak bergerak di dalam kerangka teologis, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Tim Peneliti ICDS yang menunjukkan bahwa terdapat masalah kekurangpekaan dari kaum injili terhadap pelayanan orang miskin.⁶⁷ Ada beragam alasan yang diutarakan. Akan tetapi hal ini menyiratkan bahwa tindakan sosial belum menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian besar kaum injili di Indonesia. Sementara itu, kemiskinan terjadi karena sebuah proses “alamiah” yang tidak terhindarkan akibat globalisasi yang membawa dampak besar bagi dunia. Idealnya, kesadaran terhadap dampak globalisasi dan masalah kemiskinan yang ditimbulkan harus dimiliki oleh semua orang dari semua anggota masyarakat lintas bangsa, suku, agama, ilmu dan disiplin. Karena itu, upaya transformasi ini harus menjadi agenda

⁶⁰Gideon van der Watt, “... But the Poor Opted for the Evangelicals!’—Evangelicals, Poverty and Prosperity,” *Acta Theologica* 16 (2012): 44–45. <http://doi.org/10.4314/actat.v32i1S.3>.

⁶¹Schreiter, “From Lausanne Covenant,” 90.

⁶²Steuernagel, “Social Concern and Evangelization,” 53.

⁶³Wright dan Bonk, ed., “The Cape Town Commitment,” 65.

⁶⁴Ibid., 65–71.

⁶⁵Rene C. Padilla, “The Future of the Lausanne Movement,” *International Bulletin of Missionary Research* 35, no.

2 (April 2011): 87, <https://doi.org/10.1177/239693931103500204>. Menurut Padilla, Lausanne III telah meletakkan penginjilan pada kebutuhan primer sedangkan tanggung jawab sosial pada kebutuhan sekunder. Dampak dari hal ini adalah Lausanne III memisahkan apa yang dikategorikan kudus dan yang sekuler. Melaksanakan tanggung jawab sosial bagi orang-orang marginal yang belum menerima Kristus adalah golongan dari kebutuhan sekunder.

⁶⁶Wright dan Bonk, ed. “The Cape Town Commitment,” 59–80.

⁶⁷Lih. Tim Peneliti ICDS, “Gereja dan Kemiskinan,” 17.

utama semua orang, demi terwujudnya tatanan dunia yang lebih baik. Dalam konteks ini, tentu kehadiran orang percaya bukanlah suatu kebetulan. Allah menyatukan semua golongan, baik yang kaya dan yang miskin, di dalam suatu tempat dengan tujuan supaya *“they may meet together and hold fellowship with each other so that the poor receive and the rich give.”*⁶⁸

Melalui konferensi-konferensi tersebut, gerakan Lausanne telah meletakkan fondasi yang kuat dan progresif yang menyatakan bahwa misi Allah idealnya adalah bersifat holistik atau utuh.⁶⁹ Lebih lagi, melalui ketiga dokumen Lausanne, kaum injili dibangun kembali untuk masuk dan terlibat ke dalam dunia, baik itu dalam kebudayaan yang sedang berkembang maupun mengenai isu penginjilan dan tanggung jawab sosial yang ada. Terdapat tiga pokok teologis dari tiga dokumen Lausanne yang penulis akan fokuskan.

Pokok teologis pertama adalah tanggung jawab sosial sebagai misi Allah dipahami dalam kerangka keutuhan penciptaan. Dalam dokumen LC 5 mengenai “tanggung jawab sosial” dituliskan pada butir ke-5 bahwa Tuhan adalah pencipta dan hakim atas segala sesuatu. Karena itu, sebagai umat Tuhan, komunitas orang percaya seharusnya juga berbagian dalam kepedulian terhadap keadilan dan rekonsiliasi atas seluruh ciptaan dan dari segala penindasan. Butir ini menegaskan bahwa ketika umat Tuhan menerima Yesus Kristus maka ia akan dilahirbarukan untukewartakan kebenaran kerajaan Allah. Keselamatan yang diberikan seharusnya mengubah orang percaya untuk memiliki totalitas dalam tanggung jawab sosial, baik itu kepada pribadi maupun masyarakat.⁷⁰ Dengan demikian, berdasarkan

alasan-alasan di atas, keterlibatan aktif kaum injili dalam membawa perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat merupakan bagian dari mandat penciptaan dunia ini.⁷¹

Berkaitan dengan itu, MM 4 juga telah membahas hal ini dalam satu tema yaitu: *“The Gospel and Social Responsibility.”*⁷² Konsep Injil yang tidak dapat diberitakan di dalam ruang hampa dapat semakin terlihat di bagian ini. Sebagai dampaknya, proklamasi Injil Kristus juga mempunyai implikasi sosial yang tak terhindarkan.⁷³ Kesadaran ini direspons lewat MM 4 yang menyatakan demikian:

*We repent that the narrowness of our concerns and vision has often kept us from proclaiming the lordship of Jesus Christ over all of life, private and public, local and global. We determine to obey his command to “seek first the kingdom of God and his righteousness.”*⁷⁴

Sebagai dampak dari hal ini, tentunya proklamasi Injil dan tanggung jawab sosial tidak dipertentangkan, bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pokok teologis kedua adalah tanggung jawab sosial menjadi bagian dari misi Allah yang difokuskan kepada manusia dan dunianya. Seperti dokumen LC 5 yang sudah penulis utarakan di atas, kaum injili perlu memahami manusia dan dunianya dalam kerangka berpikir bahwa manusia dan dunianya telah jatuh ke dalam dosa. Manifestasi dari kerusakan tersebut dapat terlihat dalam berbagai kejahatan, ketidakadilan, alienasi, opresi dan diskriminasi yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Karena itu, tidak heran apabila muncul masalah kemiskinan

⁶⁸Ronald S. Wallace, *Calvin, Geneva, and the Reformation: A Study of Calvin as Social Reformer, Churchman, Pastor and Theologian* (Grand Rapids: Baker, 1990), 91.

⁶⁹Russell, “Christian Mission Is Holistic,” 93–98.

⁷⁰Gill, “Christian Social Responsibility,” 85–86.

⁷¹Vinay Samuel and Chris Sugden, *Evangelicals and Development: Toward a Theology of Social Change*, ed. Ronald J. Sider (Philadelphia: Westminster, 1981), 50.

⁷²John Stott, “The Manila Manifesto,” dalam *Making Christ Known*, 230.

⁷³Ibid.

⁷⁴Ibid.

dan ketidakberdayaan di dalam struktur dunia ini. Reformasi sosial Kristen seharusnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan manusia secara utuh atau holistik, sehingga terjadi perubahan baik dalam dimensi rohani (keselamatan di dalam Kristus) maupun dalam dimensi ragawi.⁷⁵

Berkaitan dengan isu kemiskinan, Komitmen Cape Town telah memberikan fondasi dari sudut pandang yang alkitabiah. Pada TCTC 1.7.C, terdapat pemahaman demikian:

*We love the world's poor and suffering. The Bible tells us that the Lord is loving toward all he has made, upholds the cause of the oppressed, loves the foreigner, feeds the hungry, sustains the fatherless and widow. The Bible also shows that God wills to do these things through human beings committed to such action. God holds responsible especially those who are appointed to political or judicial leadership in society, but all God's people are commanded—by the law and prophets, Psalms and Wisdom, Jesus and Paul, James and John—to reflect the love and justice of God in practical love and justice for the needy.*⁷⁶

Pengakuan ini sangatlah penting mengingat tanggung jawab sosial jarang dibahas oleh kaum injili. Padilla mengatakan bahwa sebagian besar dari kongres ketiga adalah untuk membahas mengenai tanggung jawab sosial dalam terang kasih Allah kepada manusia dan dunia ciptaan-Nya.⁷⁷ Komitmen ini mengajak mereka untuk memikirkan konkretisasi arti pengakuan iman bersama dan penegasan yang sudah dibuat dan diambil bersama dalam kongres penting sebelumnya. Dengan dirumuskan-

nya kongres ini, penulis melihat bahwa ada perubahan sikap pada kaum injili dalam beberapa waktu terakhir ini, di mana mereka mulai memikirkan mengenai keterlibatannya pada tanggung jawab sosial. Paling tidak ada dua dampak dari pengakuan ini terhadap paradigma kaum injili khususnya dalam keterlibatannya pada masalah kemiskinan. Pertama, pengakuan dari dokumen ini mengingatkan kaum injili bahwa orang yang miskin juga mendapat perhatian Allah. Sebagai dampaknya, seorang injili pun perlu memperhatikan nasib dari orang miskin, sebagaimana Allah memperhatikan mereka. Secara praktis, paradigma misi kaum injili yang demikian berimplikasi pada praktik-praktik misi yang bersifat paradoks. Di satu sisi, ada nuansa “penarikan diri dari dunia” dan, di sisi lain, bernuansa “keterlibatan di dunia.” Kedua, kaum injili disadarkan bahwa keadilan sosial dan tanggung jawab sosial pun dibahas di dalam Injil dan surat-surat Paulus. Dengan demikian, penginjilan dan tanggung jawab sosial tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum injili. Sebaliknya, paradigma misi kaum injili menjadi lebih luas, utuh dan transformatif

Pokok teologis ketiga adalah tanggung jawab sosial hanya dimungkinkan oleh tindakan penebusan dan pendamaian. Pada LC 5 seperti yang sudah diutarakan di atas, jangkauan penebusan (*redemption*) Yesus Kristus seharusnya menyentuh seluruh kosmos. Ia tidak saja sebagai Sang Pencipta, tetapi Ia juga adalah pembawa damai bagi segala sesuatu yang ada di dunia ini.⁷⁸ Yesus serta karya-Nya yang menebus dan mendamaikan membawa perubahan dalam kehidupan manusia yang oleh karena dosa mengalami disintegrasi.⁷⁹

⁷⁵Earle E. Cairns, *The Christian in Society: Biblical and Historical Percepts for Involvement Today* (Chicago: Moody, 1973), 20–21.

⁷⁶Wright dan Bonk, ed., “The Cape Town Commitment,” 65

⁷⁷Padilla, “From Lausanne I to Lausanne III,” 44.

⁷⁸Wayne Grudem, *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine* (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 580. Kata “penebusan” dan “pendamaian” merupakan istilah

yang terkait erat satu dengan yang lain. Meskipun demikian, keduanya memiliki penekanan yang berbeda: *reconciliation* lebih menekankan “pemulihan hubungan,” sedangkan *redemption* menekankan tentang “membayar ganti rugi.”

⁷⁹Robert E. Webber, *Common Roots: A Call to Evangelical Maturity* (Grand Rapids: Zondervan, 1982), 209–210.

Berkaitan dengan pemulihan ini, ada beberapa penekanan yang perlu diperhatikan.⁸⁰ Karya Kristus mengubah dunia oleh kasih radikal yang dilakukan-Nya di dunia ini. Dengan kasih, Kristus memberi perhatian secara penuh terhadap realitas yang terjadi pada orang-orang yang miskin, sakit, berdosa dan merasa diri benar, tanpa menghitung kemajuan sosial dan konsekuensi politik yang ada. Dengan jalan demikian telah Ia mengekspos dosa dan ketidakadilan yang terjadi dengan tujuan membangkitkan pertobatan. Karya Kristus menuntun kepada konflik, dan pada saat yang sama, Ia mengatasinya. Karya Kristus selama di dunia ini tidak selalu mendatangkan perdamaian. Penolakan terhadap karya-Nya telah mendatangkan konflik, namun di sisi lain, karya-Nya telah membawa rekonsiliasi. Pemulihan yang dilakukan oleh Kristus membawa kemerdekaan manusia, sebab karya kematian-Nya telah mendamaikan hubungan antara manusia dengan Allah. Pemulihan ini mengarahkan respons sosial dari orang-orang percaya. Sejalan dengan ini, transformasi sosial hanya dimungkinkan melalui pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah.⁸¹ Karya Kristus mendorong orang percaya untuk melibatkan diri pada moral dan cara hidup Kristiani yang positif, mempersiapkan diri untuk melayani orang lain dan dunia secara sosial, sehingga membawa dampak bagi pemulihan manusia dan alam semesta.

⁸⁰Dieter T. Hessel, *Reconciliation and Conflict: Church Controversy over Social Involvement* (Philadelphia: Westminster, 1969), 32–40.

⁸¹Bryant L. Myers, *Walking with the Poor: Principles and Practices of Transformational Development* (Maryknoll: Orbis Books, 2007), 93. Beberapa penegasan yang dibuat oleh dokumen MM mengenai “mandat penebusan” sebagai kelanjutan dari kongres pertama, tertuang khususnya pada afirmasi ke-7 dan ke-20 (Lih. Stott, *The Manila Manifesto*, 231–232). Lewat kedua afirmasi ini dapat terlihat bahwa kaum injili seharusnya membangun paradigma misinya di dalam narasi besar penebusan yang melintas dari penciptaan, kejatuhan, penebusan dan penciptaan yang baru. Misi bukan saja soal “memenangkan jiwa bagi Kristus,” tetapi juga berurusan dengan berbagai isu kekinian.

Menariknya, pemahaman ini dilanjutkan dalam TCTC 1.7.C, dengan pengakuan bahwa perjuangan orang percaya melawan kejahatan sebagai dimensi peperangan rohani yang hanya dapat dilakukan melalui kemenangan salib dan kebangkitan, dengan kuasa Roh Kudus serta doa yang dilakukan secara terus-menerus.⁸² Lewat pengakuan ini, terdapat pengakuan bahwa terdapat dosa nonspiritual yang secara nyata terlihat di dalam budaya manusia. Dosa telah mencemari bukan saja diri manusia, namun juga budaya. Seharusnya tidak ada pemisahan spiritual-duniawi di dalam kaca mata kaum injili, khususnya dalam perdebatan mengenai tanggung jawab sosial dan juga penginjilan. Mengenai hal ini, Maggay telah memberikan kritiknya kepada kaum injili di Asia yang sering memandang misi holistik dengan membedakan antara yang sekuler dengan yang sakral.⁸³ Perjuangan spiritual juga harus dinyatakan di dalam dunia nyata, khususnya melawan opresi dan kemiskinan.

Lokus dari pembahasan ini adalah tindakan nyata yang dapat dilakukan kaum injili di dalam memerangi kemiskinan yang sistemik. Pada TCTC II.B.3b dinyatakan demikian: “*We embrace the witness of the whole Bible, as it shows us God’s desire both for systematic economic justice and for personal compassion, respect and generosity towards the poor and*

⁸²Dowsett, *The Cape Town Commitment*. Lebih lanjut lihat dokumen TCTC I.7.C. Lewat pengakuan tersebut terlihat bahwa tindakan kasih yang dinyatakan dalam keadilan ini tidak dapat dilepaskan dari poin TCTC II.A.1 yang menyatakan bagaimana seorang Kristen dapat menjadi murid-murid Kristus yang menghidupi kebenaran dan dilanjutkan dengan menyatakan bahwa sebagai bagian dari menghidupi kebenaran, “*Works and words much go together.*” Untuk penjelasan lebih lengkap lihat juga Padilla, “The Future of the Lausanne Movement,” 87. Dengan demikian, lewat pengakuan ini, minimal tidak ada pemisahan antara penginjilan dan juga aksi sosial.

⁸³Lih. Melba Padilla Maggay, *Transformasi Masyarakat: Refleksi Keterlibatan Sosial Kristen*, ed. Johan Hasan, trans. Yohanes Somawiharja (Jakarta: PT. Ergon Radix Integrita, 2004), 11.

needy."⁸⁴ Dari pengakuan ini, kaum injili dapat melibatkan diri untuk mendirikan suatu keadilan ekonomi yang tersistem dan juga mengaplikasikan hasrat untuk mewujudkan keadilan tersebut.⁸⁵

Dengan menekankan sejarah keselamatan, gerakan Lausanne meletakkan tanggung jawab sosial di dalam ketegangan antara "*the present age*" dan "*the age to come*" (*the already* dan *the not yet*) di dalam kerajaan Allah.⁸⁶ Orang percaya hidup "*in between times*," antara masa lalu dan masa depan, antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, antara apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, dan antara realitas masa kini dan realitas masa depan. Ada beberapa implikasi dari ketegangan ini. Pertama, dunia dan masalah yang ada di dalamnya (termasuk masalah sosial) adalah bagian dari karakteristik *the present age*. Masalah-masalah sosial, termasuk juga di dalamnya kemiskinan, yang bersumber dari kesalahan dan kejahatan manusia memang belum hilang sama sekali. Hal ini telah menjadikan dunia sebagai tempat yang sangat memprihatinkan.

Dalam pengharapan eskatologis inilah transformasi sosial Kristen harus diletakkan, sehingga siapa saja yang terlibat di dalamnya memahami bahwa selalu ada kesempatan dan kemungkinan untuk mengubah keadaan dunia ini melalui manifestasi kerajaan Allah. Semua ini dapat terjadi jika perkataan dan perbuatan dapat berjalan bersama dalam kesaksian dan pelayanan gereja.⁸⁷ Dengan demikian, perjanjian ini ingin menegaskan bahwa Allah memiliki rencana bagi dunia ini

dan umat Allah dipanggil untuk secara transformatif berpartisipasi dalam rencana itu dengan membawa dunia beserta manusia yang ada di dalamnya kepada totalitas keutuhannya.⁸⁸

Berkaca dari apa yang sudah dijelaskan di atas, kaum injili di Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, diharapkan dapat berpartisipasi menanggapi masalah-masalah sosial yang ada, khususnya isu kemiskinan di negeri ini. Ketiga dokumen Lausanne dan eksposisinya diharapkan dapat memberikan semacam fondasi teologis bagi kontribusi kaum injili dalam transformasi sosial.

KESIMPULAN

Melalui ketiga dokumen dari gerakan Lausanne telah disarikan teologi dari kaum injili pada zamannya dan juga, sebagaimana diungkapkan oleh Mark Noll, sebagai upaya "*represent and stimulate important changes among the world's conservative or evangelical Protestants.*"⁸⁹

Ketiga dokumen dan eksposisinya di atas telah memberikan semacam fondasi secara teologis mengenai transformasi sosial, khususnya dalam hal keterlibatan kaum injili di dalam masalah-masalah sosial yang ada. Dalam konteks yang lebih sempit, situasi sosial yang terjadi di Indonesia telah sedemikian mendesak sehingga upaya transformasi sosial menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi bangsa ini. Ketiga dokumen Lausanne ini telah menyiratkan suatu kebutuhan dari keterlibatan aktif kaum injili pada masalah

⁸⁴Wright dan Bonk, ed., "The Cape Town Commitment," 70.

⁸⁵PGI sendiri sudah membukukan beberapa buku mengenai agama dan juga problema kemiskinan di Indonesia. Lih. Yewangoe, "Keprihatinan dan Harapan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan di Indonesia."

⁸⁶Herman N. Ridderbos, *The Coming of the Kingdom*, ed. Raymond O. Zorn, trans. H. de Jongste (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1962). Lih. juga G.E. Ladd, "The Gospel of the Kingdom," in *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*, ed. Ralph D. Winter and Steven C. Hawthorne (Pasadena: William Carey Library,

2009). Lih. juga John R.W. Stott, *The Contemporary Christian* (Leicester: InterVarsity, 1993), 378–388.

⁸⁷Timothy Dudley-Smith, ed., *Authentic Christianity: From the Writings of John Stott* (Downers Grove: InterVarsity, 1996), 343.

⁸⁸John R.W. Stott, "The Significance of Lausanne," *International Review of Mission* 64, no. 255 (Juli 1975): 288–294.

⁸⁹Noll, *Turning Points*, 297. Penulis melihat sekalipun Noll hanya memberikan keterangan dari Perjanjian Lausanne, tetapi ketiga dokumen ini tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

kemiskinan. Dampaknya, seorang injili, dengan atau tanpa menggunakan ketiga dokumen ini, perlu memikirkan suatu teologi injili yang kontekstual dan integratif di dalam konteks Indonesia. Proklamasi Injil tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial orang-orang injili di Indonesia. Kemiskinan, sebagai salah satu indikator adanya krisis yang sangat serius ini, bukan lagi menjadi sebuah fenomena, tetapi sudah menjadi realitas kehidupan sehari-hari yang membutuhkan perhatian serius. Dengan demikian, transformasi sosial harus dimulai, tidak dari orang lain, tetapi lebih dahulu dari dan oleh orang-orang injili di Indonesia. Akhirnya, apa yang telah dideklarasikan oleh gerakan Lausanne, seharusnya menjadi panggilan sekaligus pengingat bagi kaum injili di Indonesia bahwa, “*We are gathered in Lausanne to let the earth hear His voice.*”

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Kedua penulis menyatakan telah memberikan kontribusi substansial untuk perancangan dan penulisan hasil penelitian. Kedua penulis bertanggung jawab atas analisis, interpretasi dan diskusi hasil penelitian.

Konflik Kepentingan

Kedua penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir. Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan apa pun yang dapat memengaruhinya dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Berneburg, Erhard. “Conference Theology: Mission Theology after San Antonio and Manila.” *Themelios (An International Journal for Theological and Religious Studies Students)* 16, no. 2 (February 1991).
- Bilangan Research Center, “Pelayanan dan Dinamika Gereja Selama Pandemi Covid-19,” disampaikan dalam Seminar *Online* Hasil Temuan Survei Nasional, Juni 2020.
- Bilangan Research Center, “Spiritualitas Umat Kristen Indonesia 2021,” disampaikan dalam Seminar *Online* Pendalaman Hasil Survei Nasional Spiritualitas 2021, Juni 2021.
- Bonk, Jonathan J. “The Cape Town Commitment: A Confession on Faith and a Call to Action.” *International Bulletin of Missionary Research* 35, no. 2 (April 2011): 59–80.
- Cairns, Earle E. *The Christian in Society: Biblical and Historical Percepts for Involvement Today*. Chicago: Moody, 1973.
- Cameron, J. E. M., ed. *Christ Our Reconciler: Gospel, Church, World*. Downers Grove: InterVarsity, 2012.
- Coote, Robert T. “Lausanne II and World Evangelization.” *International Bulletin of Missionary Research* 14, no. 1 (Januari 1990): 10. <https://doi.org/10.1177/239693939001400103>.
- Djurubasa, Arkipus, and Ricardo Freedom Nanuru. “Pemetaan dan Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan pada Jemaat-Jemaat Gereja Masehi Injili Di Halmahera (GMIH) Di Kabupaten Pulau Morotai.” *LPPM Universitas Halmahera – Tobelo* (2015): 1–16.
- Dowsett, Rose. “Evangelism, Service and Social Action in the Missional Understanding of the Cape Town Commitment.” *Norwegian Journal of Missiology* 71, no. 4 (2017): 45–53. <https://doi.org/10.48626/ntm.v71i4.4401>.
- . *The Cape Town Commitment: Study Edition*. Peabody: Hendrickson, 2012.
- Escobar, Samuel. “A Movement Divided: Three Approaches to World Evangelization Stand in Tension Wit One Another.” *Transformation* 8, no. 4 (Oktober 1991): 7–13. <https://doi.org/10.1177/026537889100800409>.
- Firdausy, Carunia Mulya. “Garis Kemiskinan Perlu Dinaikkan.” *Kompas*, 17 Oktober 2014. Diakses 7 November 2019. <https://>

- www.brin.go.id/garis-kemiskinan-perludinaikkan.
- . “Revisi Atas Garis Kemiskinan.” *Harian Kompas*, 21 April 2014. Diakses 7 November 2019. <https://cpps.ugm.ac.id/revisi-atas-garis-kemiskinan>.
- Gill, Athol. “Christian Social Responsibility.” Dalam *The New Face of Evangelicalism: An International Symposium on the Lausanne Covenant*, diedit oleh Rene C. Padilla. Downers Grove: InterVarsity, 1976.
- Graham, Billy. “Let The Faith Hear His Voice.” Dalam *Let the Earth Hear His Voice: A Comprehensive Reference Volume on World Evangelization*, diedit oleh J D. Douglas. Minneapolis: World Wide, 1975.
- Grudem, Wayne. *Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine*. Grand Rapids: Zondervan, 1994.
- Hendro Suwito. “Nightmares continue for Indonesia’s Poor.” *Global Future: A World Vision Journal of Human Development* (First Quarter 2001): 9–10.
- Hessel, Dieter T. *Reconciliation and Conflict: Church Controversy over Social Involvement*. Philadelphia: Westminster, 1969.
- Johnston, Arthur, ed. *The Battle for World Evangelism*. Wheaton: Tyndale, 1978.
- Ladd, G.E. “The Gospel of the Kingdom.” Dalam *Perspectives on the World Christian Movement: A Reader*, diedit oleh Ralph D. Winter and Steven C. Hawthorne, bab 13. Pasadena: William Carey Library, 2009.
- Maggay, Melba Padilla. *Transformasi Masyarakat: Refleksi Keterlibatan Sosial Kristen*. Diedit oleh Johan Hasan. Diterjemahkan oleh Yohanes Somawiharja. Jakarta: PT. Ergon Radix Integrita, 2004.
- Myers, Bryant L. *Walking with the Poor: Principles and Practices of Transformational Development*. Maryknoll: Orbis Books, 2007.
- Nichols, Alan. *The Whole Gospel for the Whole World: Story of Lausanne II Congress on World Evangelization, Manila, 1989*. Charlotte: Lausanne Committee for World Evangelization, 1989.
- Noll, Mark A., ed. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*. Ed. ke-3. Grand Rapids: Baker, 2012.
- Nurwati, Nunung. “Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan.” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10, no. 1 (2008): 1–11. <https://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>.
- Padilla, Rene C. “From Lausanne I to Lausanne III.” *Journal of Latin American Theology* 5, no. 2 (2010): 19–50.
- Padilla, Rene C. “The Future of the Lausanne Movement.” *International Bulletin of Missionary Research* 35, no. 2 (April 2011): 86–87. <https://doi.org/10.1177/239693931103500204>.
- Ridderbos, Herman N. *The Coming of the Kingdom*. Diedit oleh Raymond O. Zorn. Diterjemahkan oleh H. de Jongste. Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1962.
- Russell, Mark. “Christian Mission Is Holistic.” *International Journal of Frontier Missiology* 25, no. 2 (2008): 93–98.
- Samuel, Vinay, dan Chris Sugden. *Evangelicals and Development: Toward a Theology of Social Change*, diedit oleh Ronald J. Sider. Philadelphia: Westminster, 1981.
- Scherer, James A., and Stephen B. Bevans. *New Directions in Mission and Evangelization: Basic Statements 1974-1991*. Vol. 1. Maryknoll: Orbis, 1992.
- Schreiter, Robert J. “From Lausanne Covenant to the Cape Town Commitment: A Theological Assessment.” *International Bulletin of Missionary Research* 35, no. 2 (April 2011): 88–93. <https://doi.org/10.1177/239693931103500205>.
- Sinulingga, Risnawaty. “Ekonomi Kerakyatan Menurut Kitab Amsal.” Dalam *Ekonomi Kerakyatan*, diedit oleh Muhammad Ridwan, 51–62. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara/American Institute for Indonesian Studies, 2014.

- Steuernagel, Valdir R. “Social Concern and Evangelization: The Journey of the Lausanne Movement.” *International Bulletin of Missionary Research* 15, no. 2 (April 1991): 53–56. <https://doi.org/10.1177/239693939101500202>.
- Stott, John R.W. “The Significance of Lausanne.” *International Review of Mission* 64, no. 255 (Juli 1975): 288–294.
- . *Christian Counter-Culture: The Message Of The Sermon On The Mount*. Downers Grove: InterVarsity, 1978.
- . *The Spirit, the Church, and the World: The Message of Acts*. Downers Grove: InterVarsity, 1990.
- . *Christian Basics*. Grand Rapids: Baker, 1991.
- . *The Contemporary Christian*. Leicester: InterVarsity, 1993.
- . *Romans: God’s Good News for the World*. Downers Grove: InterVarsity, 1994.
- Stott, John R.W. dan Timothy Dudley-Smith, ed., *Authentic Christianity: From the Writings of John Stott*. Downers Grove: InterVarsity, 1996.
- Stott, John R.W. *Guard the Truth: The Message of 1 Timothy and Titus*. Downers Grove: InterVarsity, 1997.
- . *Making Christ Known: Historic Mission Documents from the Lausanne Movement, 1974–1999*. Grand Rapids: Eerdmans, 1997.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma. “Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 175–192.
- Tim Peneliti ICDS. “Gereja dan Kemiskinan: Suatu Survei Tentang Respon Gereja Kalangan Injili di Kota Jakarta dan Bandung Terhadap Masalah Kemiskinan.” *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan* 4, no. 1 (2002): 5–20.
- Van der Watt, Gideon. “‘... But the Poor Opted for Evangelicals’—Evangelicals, Poverty and Prosperity.” *Acta Theologica* 16 (2012): 35–53. <http://doi.org/10.4314/actat.v32i1S.3>.
- Wallace, Ronald S. *Calvin, Geneva, and the Reformation: A Study of Calvin as Social Reformer, Churchman, Pastor and Theologian*. Grand Rapids: Baker, 1990.
- Webber, Robert E. *Common Roots: A Call to Evangelical Maturity*. Grand Rapids: Zondervan, 1982.
- Wright, Christopher J.H., dan Jonathan J. Bonk, ed. “The Cape Town Commitment: A Confession of Faith and A Call to Action.” *International Bulletin of Missionary Research* 35, no. 2 (April 2011): 1–68. <https://doi.org/10.1177/239693931103500202>.
- Wright, Christopher J.H. *The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative*. Downers Grove: InterVarsity, 2006.
- Wuryandani, Dewi. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya.” *Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis XII*, no. 15 (Agustus 2020): 19–24. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-15-I-P3DI-Agustus-2020-206.pdf.
- Yewangoe, A.A. “Keprihatinan dan Harapan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan di Indonesia.” Dalam *Gerakan Oikoumene: Tegar Mekar Di Bumi Pancasila*, diedit oleh J.M. Pattiasina dan Weinata Sairin. Ed. ke-4. Jakarta: Gunung Mulia, 2012.
- Yosia, Adrianus. “Apakah yang Cape Town Perlu Katakan pada [Kaum Injili di] Indonesia?: Suatu Tinjauan dan Refleksi terhadap Komitmen Cape Town dan Implikasinya pada Kaum Injili di Indonesia.” *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 16, no. 2 (2017): 115–134. <https://doi.org/10.36421/veritas.v16i2.13>.
- “The Lausanne Covenant.” *Lausanne Movement*. <https://lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant>.
- “The Manila Manifesto.” *Lausanne Movement*. <https://lausanne.org/content/manifesto/the-manila-manifesto>.

“The Cape Town Commitment,” *Lausanne Movement*. <https://lausanne.org/content/ctc/ctcommitment>